



**HAMBATAN PELAKSANAAN PERMOHONAN EKSTRADISI
DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 369/PID.SUS/2020/PT.DKI.JKT jo.
NOMOR 104/PID.C.EKSTRADISI/2020/PN.JKT.SEL.)**

TESIS

I GDE EKA HARYANA

1810622067

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2022**



**HAMBATAN PELAKSANAAN PERMOHONAN EKSTRADISI
DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**
**(STUDI PUTUSAN NOMOR: 369/PID.SUS/2020/PT.DKI.JKT jo.
NOMOR 104/PID.C.EKSTRADISI/2020/PN.JKT.SEL.)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

I GDE EKA HARYANA

1810622067

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : I Gde Eka Haryana

NIM : 1810622067

Tanggal : 29 Juni 2022

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 29 Juni 2022

Yang menyatakan,



I Gde Eka Haryana

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gde Eka Haryana

NIM : 1810622067

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti *Non
Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**HAMBATAN PELAKSANAAN PERMOHONAN EKSTRADISI DALAM
HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR:
369/PID.SUS/2020/PT.DKI.JKT jo. NOMOR
104/PID.C.EKSTRADISI/2020/PN.JKT.SEL.)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan,
mengalihkan dan mempublikasikan karya tesis saya selama tetap mencantumkan
nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta
Tanggal 29 Juni 2022
Yang Menyatakan,

I Gde Eka Haryana

PENGESAHAN

Tesis diajukan Oleh :

Nama : I GDE EKA HARYANA
NIM : 1810622067
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : **HAMBATAN PELAKSANAAN PERMOHONAN EKSTRADISI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 369/PID.SUS/2020/PT.DKI.JKT jo. NOMOR 104/PID.C.EKSTRADISI/2020/PN.JKT.SEL.)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan tim penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Embangunan Nasional Veteran Jakarta.


Dr. Heru Sugiyono, SH, MH
Ketua Pengaji


Dr. Handoyo Prasetyo, SH, MH
Pengaji 1


Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH, MH
Pengaji 2 / Pembimbing


Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM
Kaprodi



: Jakarta
: 29 Agustus 2022

**HAMBATAN PELAKSANAAN PERMOHONAN EKSTRADISI DALAM
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**
**(STUDI PUTUSAN NOMOR: 369/PID.SUS/2020/PT.DKI.JKT jo. NOMOR
104/PID.C.EKSTRADISI/2020/PN.JKT.SEL.)**

I GDE EKA HARYANA

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, serta dilakukan pendekatan hukum empiris dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan permohonan ekstradisi. Penelitian dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai hambatan yang ada pada pemeriksaan perkara ekstradisi dalam putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PT.DKI.JKT *jo* No. 104/Pid.C.Ekstradisi/2020/PN.Jkt.Sel dan bertujuan pula untuk mengetahui serta menjabarkan mengenai upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan ekstradisi dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa berdasarkan putusan tersebut terdapat kendala yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam permohonan ekstradisi, diantaranya adalah perbedaan hukum dan sistem hukum, perkembangan hukum di negara maju dan berkembang, adanya kepentingan nasional yang membawa dampak pada perbedaan sudut pandang suatu negara dalam memerangi suatu kejahatan, proses ekstradisi yang berbelit-belit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 sehingga akan menghabiskan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, serta pemahaman aparat pelaksana dalam ekstradisi yang minim. Atas kendala tersebut, maka perlu kiranya untuk melakukan upaya sebagai upaya mengatasi hambatan dalam pemeriksaan perkara ekstradisi dengan melihat dari kebijakan ekstradisi di Amerika Serikat, Filipina, dan Australia yang lebih ringkas serta terdapat peran jaksa yang domunan tanpa melibatkan pihak kepolisian atau pihak lainnya serta tidak bergantung kepada Menteri Luar Negeri untuk menerima permintaan ekstradisi secara resmi. Kedua hal tersebut yang menjadikan prosedur pemeriksaan perkara ekstradisi pada negara-negara tersebut lebih praktis dan tidak memakan banyak waktu. Selain itu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pencermatan perbedaan hukum dan sistem hukum, membuat kebijakan politik hukum nasional yang menyangkut masalah ekstradisi, mengadakan perjanjian ekstradisi antar negara, serta mengadakan sosialisasi kepada aparat pelaksana dalam ekstradisi tentang prosedur dan pemahaman undang-undang ekstradisi.

Kata Kunci: Pemeriksaan, Ekstradisi, Pidana

**OBSTACLES TO IMPLEMENTATION OF EXTRADITION
APPLICATIONS IN CRIMINAL LAW IN INDONESIA
(STUDY OF DECISION NUMBER: 369/PID.SUS/2020/PT.DKI.JKT jo.
NUMBER 104/PID.C.EKSTRADISI/2020/PN.JKT.SEL.)**

I GDE EKA HARYANA

ABSTRACT

This research was conducted using normative legal research methods, as well as an empirical legal approach by taking into account the facts that occurred in the field related to the implementation of the examination of extradition requests. The study was conducted to explain the obstacles in examining extradition cases in decision Number 369/Pid.Sus/2020/PT.DKI.JKT jo No. 104/Pid.C.Ekstradition/2020/PN.Jkt.Sel also aims to find out and describe the efforts that must be made to overcome obstacles to the implementation of extradition in the context of enforcing criminal law in Indonesia. So that the results of the study show that based on the decision there are obstacles faced by the Government of Indonesia in the application for extradition, including differences in the law and legal system, legal developments in developed and developing countries, the existence of national interests that have an impact on different perspectives of a country in fighting a crime, the extradition process is convoluted in Law No. 1 of 1979 so it will take a long time and no small amount of money, and the understanding of the implementing apparatus in extradition is minimal. Due to these obstacles, it is necessary to make efforts as an effort to overcome obstacles in examining extradition cases by looking at the extradition policies in the United States, the Philippines, and Australia which are more concise and there is a dominant role of prosecutors without involving the police or other parties and not relying on to the Minister of Foreign Affairs to receive a formal extradition request. These two things make the procedure for examining extradition cases in these countries more practical and less time-consuming. In addition, efforts that can be made are observing differences in the law and legal system, making national legal political policies concerning extradition issues, entering into extradition agreements between countries, and conducting socialization to the implementing apparatus in extradition regarding procedures and understanding of extradition laws.

Keywords: Examination, Extradition, Criminal

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala petunjuk dan bimbingan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan mencapai gelar Magister Hukum. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH. MH sebagai dosen pembimbing dan Tim Penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penulisan tesis ini
5. Dr. Heru Sugiono, SH. MH dan Dr. Handoyo Prasetyo, SH. MH sebagai Tim Penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penulisan tesis ini
6. Pegawai Sekretariat Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta khususnya Bapak Satino dan Ibu Julian yang sangat banyak membantu administrasi perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini.
7. Kedua orang tua saya, Bapak I Gede Tjitra dan Ibu Ni Nyoman Murti yang selalu memberikan dukungan dan doa
8. Kedua mertua saya, Bapak Dewa Putu Ardhika dan Ibu Luh Ayu Sarini yang selalu memberikan dukungan dan doa
9. Istri saya tercinta dan tersayang Desak Putu Rini Andhini dan putra-putri kami tercinta dan tersayang I Gde Mahezha Astawa (Dede) dan Ni

Made Umaniezha Radhity (Nonon) yang selalu memberi semangat untuk penyelesaian tesis ini

10. Adik-adik saya I Made Oka Haryawan beserta keluarga, Ni Nyoman Dessy Hariani beserta keluarga yang selalu memberikan doa yang menyemangati
11. Teman-teman Magister Hukum angkatan 2018 yang selalu saling berbagi informasi tentang penyelesaian tesis
12. Teman-teman di Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang membantu menyiapkan berbagai dokumen penanganan perkara

Jakarta, 29 Juni 2022

I Gde Eka Haryana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori dan Konseptual	7
F. Sistematika	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana Internasional	31
C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	48
D. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana	52
E. Tinjauan Umum Ekstradisi.....	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	72
A. Tipe Penelitian.....	72
B. Pendekatan Penelitian.....	72
C. Sifat Penelitian	73
D. Sumber Data	73
E. Metode Pengumpulan Data	74
F. Analisis Data	76
BAB IV PEMBAHASAN.....	78
A. Analisa Hambatan Pemeriksaan Perkara Ekstradisi dalam Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PT.DKI.JKT jo. No. 104/ Pid.C. Ekstradisi/2020/PN.Jkt.Sel.....	78
B. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemeriksaan Perkara Ekstradisi	142
BAB V PENUTUP.....	178
A. Kesimpulan.....	178
B. Saran	179
DAFTAR PUSTAKA	180
RIWAYAT HIDUP	